



Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022

Diyana Mila Hafsari¹ Kiki Asmara² Vidya Nurina Paramita³

^{1,2,3} Ekonomi Pembangunan, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya

Abstrak

Received: 07 Oktober 2024
Revised: 12 Oktober 2024
Accepted: 22 Oktober 2024

Kemiskinan merupakan kekurangan dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk konsumsi dan meningkatkan kualitas hidup. Ketidaksetaraan dalam kepemilikan alat produksi menyebabkan kemiskinan, yang dipengaruhi oleh sikap masyarakat, adat istiadat, dan faktor lingkungan. Kemiskinan juga digambarkan sebagai ketidakberdayaan sekelompok orang di bawah suatu sistem pemerintahan yang membuat mereka berada dalam posisi yang sangat lemah dan tereksplorasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengertian kemiskinan, desentralisasi kebijakan pemerintah, dan indeks pembangunan manusia yang ada di Kabupaten Madiun pada tahun 2018-2022. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif. Sumber dari penelitian ini didapat dari artikel atau jurnal penelitian terdahulu, buku, dan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun.

Kata Kunci:

Desentralisasi, Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia

(*) Corresponding Author:

dynmilaaa12@gmail.com

How to Cite: Hafsari, D., Asmara, K., & Paramita, V. (2024). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(19), 272-282. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14062720>

PENDAHULUAN

Desentralisasi telah menjadi arena yang nyaman bagi para elit politik dan pialang kekuasaan lokal. Desentralisasi telah memungkinkan mereka untuk membangun kembali kekuatan politik mereka dan mengkonsolidasikan kontrol mereka atas sumber daya sosial dan ekonomi. Desentralisasi telah menciptakan arena yang otonom bagi kelompok-kelompok ini, sehingga memberikan struktur yang memungkinkan untuk mengoptimalkan kepentingan dan keuntungan mereka (Mas`udi, 2010). Oleh karena itu, tidak mengherankan jika implementasi desentralisasi dalam satu dekade terakhir didominasi oleh kisah-kisah sukses konsolidasi oligarki lokal di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Konsolidasi yang membawa energi positif terhadap tujuan substantif desentralisasi yaitu demokratisasi lokal dan pembangunan kesejahteraan.

Para elit lokal, baik di birokrasi, lembaga adat, lembaga agama, maupun politik, merasa puas dengan desentralisasi. Namun, hal itu masih jauh dari memenuhi aspirasi masyarakat untuk kesejahteraan. Beberapa data menunjukkan kurangnya dampak desentralisasi terhadap kesejahteraan. Hal ini mencakup rendahnya belanja langsung dalam struktur APBD, ketidakmampuan untuk mengidentifikasi isu-isu kesejahteraan masyarakat, kurangnya kreativitas dalam pembangunan kesejahteraan, dan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pandangan negatif yang melekat pada penerapan otonomi dan desentralisasi perlu dilawan dengan semangat memperkuat desentralisasi dengan

menghidupkan kembali prinsip-prinsip utamanya, terutama kesejahteraan masyarakat. Dengan patologi birokrasi yang begitu kuat mewarnai pelaksanaannya selama ini, desentralisasi dengan cita-cita negara untuk mencapai kesejahteraan bukan hal yang mudah.

Madiun merupakan salah satu kota dan kabupaten yang berada di jalur yang menghubungkan Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah. Dikarenakan letaknya yang strategis, Madiun sering dijadikan tempat persinggahan para wisatawan. Sekitar 268.000 wisatawan mengunjungi Madiun pada tahun 2017 dan 300.000 orang pada tahun 2018 (Madiun.solopos.com/2019). Karena banyaknya orang yang bepergian ke Madiun, perekonomian kota ini berkembang pesat. Hal ini berdampak pada semakin berkembang pesatnya perekonomian di Kabupaten/Kota Madiun. Sektor industri kuliner merupakan salah satu pilar ekonomi Madiun (Agrinda, 2016). Beberapa makanan khas Madiun, seperti brem, pecel, madu mongso, dan lempeng puli, seringkali dijadikan oleh-oleh.

LANDASAN TEORI

Kemiskinan secara luas didefinisikan sebagai keterbatasan yang dimiliki seseorang, keluarga, komunitas, atau bahkan suatu bangsa yang menyebabkan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari, lemahnya keadilan, dan penegakan hukum. (Aziz, Rochaida and Warsilan, 2016). Kemudian *world bank* (dalam Permana 2012) mengartikan kemiskinan sebagai suatu kondisi tidak memiliki kesejahteraan yang cukup, yang terdiri dari berbagai aspek. Hal ini mencakup pendapatan yang rendah dan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, kemiskinan juga mencakup kebutuhan medis akan perawatan kesehatan dan pendidikan untuk bertahan hidup.

Tujuan suatu bangsa adalah untuk berkembang. Seiring dengan meningkatnya pembangunan suatu negara, maka negara tersebut akan semakin maju. Percepatan pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tanda keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan dan pengangguran (Rustam, 2010). Efisiensi penggunaan sumber daya yang ada merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk mengukur perkembangan ekonomi selain pertumbuhan ekonomi (Yacoub, 2012).

Kemiskinan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk faktor yang disediakan oleh pemerintah. Kemiskinan dan subsidi pemerintah memiliki hubungan yang negatif. Subsidi pemerintah sangat membantu mereka yang terpenjara dalam kemiskinan. Hal ini meningkatkan kesejahteraan mereka menjadi lebih baik. Subsidi pemerintah sangat penting untuk mendorong ekspansi ekonomi. Kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi sangat erat kaitannya.

Teori Keynes menyatakan bahwa subsidi pemerintah memiliki potensi untuk menurunkan tingkat kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Krugman, 2018). Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan penurunan tingkat kemiskinan secara keseluruhan, selain bantuan dari pemerintah. Hal ini dapat dinilai dengan menggunakan parameter Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan dalam menilai tingkat kemakmuran ekonomi suatu wilayah.

Karena peningkatan PDRB akan berdampak pada penurunan kemiskinan, maka peningkatan PDRB merupakan syarat mutlak untuk mengurangi kemiskinan. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB), yang ditentukan berdasarkan tahun berjalan untuk melihat kekuatan sumber daya ekonomi, perputaran, dan struktur ekonomi suatu daerah (Pandita, 2021).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selain subsidi pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah faktor lain yang memengaruhi tingkat kemiskinan. IPM (indeks kualitas sumber daya manusia) yang lebih tinggi berhubungan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Produktivitas yang rendah dapat menjadi penyebab tingginya tingkat kemiskinan. Salah satu akibatnya adalah produksi sumber daya manusia yang berkualitas rendah. Kapasitas masyarakat untuk mengasimilasi dan memanfaatkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, mulai dari kelembagaan hingga teknologi, ditentukan atau diukur oleh tingkat IPM. Angka harapan hidup saat lahir, tingkat buta huruf, rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan di sekolah, dan tingkat paritas daya beli menjadi tiga faktor yang membentuk IPM, yaitu umur panjang, pengetahuan, dan kehidupan yang layak (Juliannisa & Siswantini, 2020).

METODE

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi deskriptif. Metode penelitian yang dikenal sebagai pendekatan deskriptif berusaha untuk secara metodis, faktual, dan akurat mengkarakterisasi, menjelaskan, atau menggambarkan sifat-sifat, detail, dan hubungan di antara fenomena yang diteliti.

Sumber data sekunder digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan dan disediakan oleh sumber selain organisasi penelitian (Sanusi, 2012). Data sekunder bisa didapatkan dari buku, artikel, catatan, dan sumber lain. Penulis mengumpulkan atau mengambil data ini dari publikasi BPS (Badan Pusat Statistik). Data yang digunakan adalah IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Madiun pada tahun 2018 sampai 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desentralisasi adalah suatu keharusan. Sentralisasi yang berlebihan telah terbukti menyebabkan warga masyarakat merasa kecewa dan tidak puas. Desentralisasi memiliki nilai yang baik karena sangat diinginkan. Sentralisasi tidak disukai dan memiliki nilai yang rendah. Beberapa ahli menyatakan bahwa desentralisasi memiliki keuntungan seperti cara ekonomi, desentralisasi menurunkan biaya, meningkatkan *output*, dan memanfaatkan sumber daya manusia dengan lebih baik, serta meningkatkan efisiensi masyarakat lokal dalam mendapatkan pelayanan publik dan barang yang mereka butuhkan. Desentralisasi secara politis dipandang dapat meningkatkan integrasi nasional, ketajaman politik, dan akuntabilitas. Desentralisasi memfasilitasi penyediaan layanan yang lebih baik, mendorong kesetaraan, kemakmuran, dan kebebasan, serta mendekatkan pemerintah dengan rakyat (Smith, 1985).

Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022.

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia	Persentase Penduduk Miskin (Persen)
2018	71,01	11,42
2019	71,69	10,54
2020	71,73	11,46
2021	71,88	11,91
2022	72,39	10,79

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun

Data **tabel 1** diatas merupakan data yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Madiun. Dari tabel tersebut, dapat diperoleh pemahaman yang penting mengenai hubungan antara kemiskinan dan pembangunan manusia di daerah tersebut. Terdapat fluktuasi dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Persentase Penduduk Miskin selama lima tahun terakhir di Kabupaten Madiun. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki dedikasi untuk mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan data tersebut, Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Madiun selama periode pengamatan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018, diawali dengan angka sebesar 11,42 persen. Untuk angka sebesar ini termasuk cukup tinggi yang menandakan bahwa banyak masyarakat yang kurang memadai sumber daya manusianya. Lalu, jumlah tersebut turun menjadi 10,54 persen pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 terjadi peningkatan yang cukup signifikan, yaitu mencapai 11,46 persen. Penyebab utama peningkatan kemiskinan ada dua. Yang pertama, virus COVID-19 menyebar ke seluruh populasi. Populasi produktif termasuk di dalamnya. Kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi berkurang karena situasi ini. Hal ini terutama berlaku untuk rumah tangga yang terkena dampak pandemi COVID-19. Kedua, perekonomian belum dapat mencapai potensi penuhnya karena adanya pembatasan sosial yang diberlakukan oleh pemerintah. Ada penutupan bisnis secara paksa dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Pada tahun 2021, Presentase Penduduk Miskin meningkat hingga 11,91 persen. Kemudian menurun drastis hingga mencapai 10,79 persen pada tahun 2022. Perubahan ini menunjukkan betapa kompleksnya masalah kemiskinan. Hal ini bisa dipengaruhi oleh beberapa hal, termasuk masalah sosial, peluang kerja, dan perubahan ekonomi.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan dalam kurun waktu yang sama dengan laju yang relatif stabil. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,01 pada tahun 2018 dan meningkat mencapai 72,39 pada tahun 2022. Meningkatnya aspek-aspek penting dalam pengembangan manusia yang meliputi pendapatan, kesehatan, dan pendidikan, terlihat dari peningkatan IPM. Hal ini menunjukkan dedikasi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang lebih baik.

Desentralisasi sebagai sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, khususnya dalam otonomi daerah, dapat menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah penyerahan wewenang

pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Desentralisasi di Indonesia selalu mengalami perubahan dalam pelaksanaannya, sehingga perlu adanya upaya dari pemerintah untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang terjadi (Iron, 2021). Desentralisasi dalam pemerintahan daerah telah berjalan dengan cukup baik. Desentralisasi pemerintahan daerah telah berhasil diterapkan di beberapa daerah di Indonesia. Namun, tidak menutup kemungkinan akan muncul adanya permasalahan. Untuk itu, perlu adanya konsistensi dalam merealisasikan pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan juga peningkatan kinerja pemerintah daerah melalui upaya-upaya perumusan peraturan perundangan dan juga perangkat kerja pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam rangka mengupayakan terlaksananya revitalisasi bagian dari proses desentralisasi dan juga otonomi daerah.

Budayawan Universitas Jember, Ayu Sutarto (2008) mengatakan, secara garis besar di Jawa Timur dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar wilayah budaya, salah satunya adalah Mataraman yang meliputi Kabupaten Ngawi, Kabupaten dan Kota Madiun, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Magetan, Kabupaten dan Kota Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten dan Kota Blitar, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Bojonegoro.

Tabel 2. Perbandingan Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Mataraman Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.

Wilayah	Persentase Penduduk Miskin (Dalam Persen)
Kabupaten Tuban	15,02
Kabupaten Ngawi	14,15
Kabupaten Pacitan	13,80
Kabupaten Lamongan	12,53
Kabupaten Bojonegoro	12,21
Kabupaten Trenggalek	10,96
Kabupaten Madiun	10,79
Kabupaten Nganjuk	10,70
Kabupaten Kediri	10,65
Kabupaten Magetan	9,84
Kabupaten Ponorogo	9,32
Kabupaten Blitar	8,71
Kota Blitar	7,37
Kota Kediri	7,22
Kabupaten Tulungagung	6,71
Kota Madiun	4,75

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Tabel 3. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah Mataraman Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.

Wilayah	Indeks Pembangunan Manusia
Kota Madiun	82,01
Kota Blitar	79,93

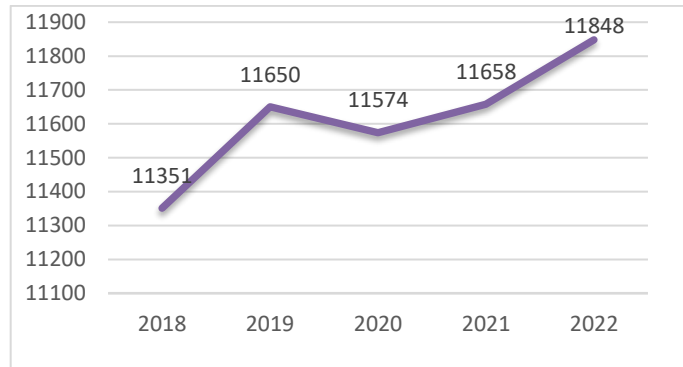
Kota Kediri	79,53
Kabupaten Magetan	74,85
Kabupaten Tulungagung	74,06
Kabupaten Lamongan	74,02
Kabupaten Kediri	73,46
Kabupaten Nganjuk	72,93
Kabupaten Madiun	72,39
Kabupaten Ponorogo	71,87
Kabupaten Blitar	71,86
Kabupaten Ngawi	71,75
Kabupaten Trenggalek	71,00
Kabupaten Bojonegoro	70,12
Kabupaten Tuban	69,67
Kabupaten Pacitan	69,37

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan **Tabel** diatas dapat dilihat bahwa data tersebut didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2022 Kabupaten Madiun memperoleh sebesar 72,39 dan berada di posisi ke-9 dari 15 kabupaten di wilayah mataraman Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Madiun mengalami fluktualisasi setiap tahunnya. Selama tahun 2020–2022, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Madiun rata-rata meningkat sebesar 0,66 persen per tahun dari 71,73 pada tahun 2020 menjadi 72,39 pada tahun 2022. Hal ini menandakan bahwa kinerja pemerintahan membaik dari tahun ke tahun. Posisi paling tinggi ditempati oleh Kota Madiun yang memperoleh Indeks Pembangunan Manusia sebesar 82,01. Sedangkan untuk Persentase Penduduk Miskin, Kabupaten Madiun memperoleh sebesar 10,79 persen dan menempati posisi ke-7. Maka dari itu, pemerintah Kabupaten Madiun harus menanggapi permasalahan tersebut, dan merencanakan aksi supaya kedepannya bisa menjadi lebih baik dan kondisi sumber daya manusia masyarakat memadai.

Lalu, posisi tertinggi penduduk miskin ditempati oleh Kabupaten Tuban yang memperoleh sebesar 15,02 persen. Dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintahan di Kota Madiun terbaik diantara mataraman yang lainnya dan membuat sumber daya manusia masyarakat memadai. Oleh karena itu, segala bentuk aksi pemerintah harus selalu dilaksanakan dan dipatuhi dengan baik supaya terus berkembang menjadi lebih baik. Sedangkan untuk Kabupaten Tuban diperlukan aksi pemerintahan yang lebih banyak lagi agar sumber daya manusia masyarakat terpenuhi dengan baik dan selalu berkecukupan untuk memenuhi kebutuhan.

Grafik 1. Pengeluaran Per Kapita Per Tahun Disesuaikan (Rp 000) di Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022.

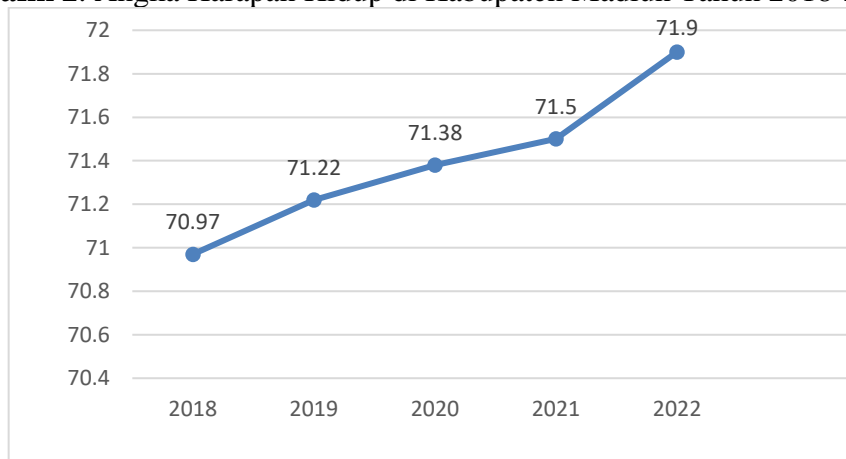


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun

Berdasarkan data **Grafik 1**, data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun mulai tahun 2018 sampai 2022, Di Kabupaten Madiun, pengeluaran Per Kapita Per Tahun meningkat dari Rp11.351.000 menjadi Rp11.650.000 pada tahun sebelum pandemi (2018-2019). Pada tahun 2020, jumlah tersebut turun menjadi Rp11.574.000 karena wabah COVID-19. Namun pada tahun 2021, angka tersebut kembali naik menjadi Rp11.658.000. Jumlah yang dibutuhkan per orang meningkat, menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi masyarakat Madiun telah meningkat. (Madiun satu data, 2002).

Kondisi ini berkaitan erat dengan kondisi ekonomi makro yang ditentukan oleh tingkat pertumbuhan PDRB yang tumbuh selama ini. Jumlah ini meningkat sekali lagi menjadi Rp 11.848.000 pada tahun 2022. Pengeluaran Per Kapita Per Tahun ini menunjukkan kegigihan penduduk Kabupaten Madiun dalam menghadapi kesulitan dan upaya mereka untuk menghidupkan kembali perekonomian setelah pandemi. Meskipun telah mengalami beberapa perubahan, kondisi ekonomi sudah mulai membaik, regulasi yang membatasi sudah mulai dilonggarkan, dan daya beli masyarakat cukup meningkat.

Grafik 2. Angka Harapan Hidup di Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022



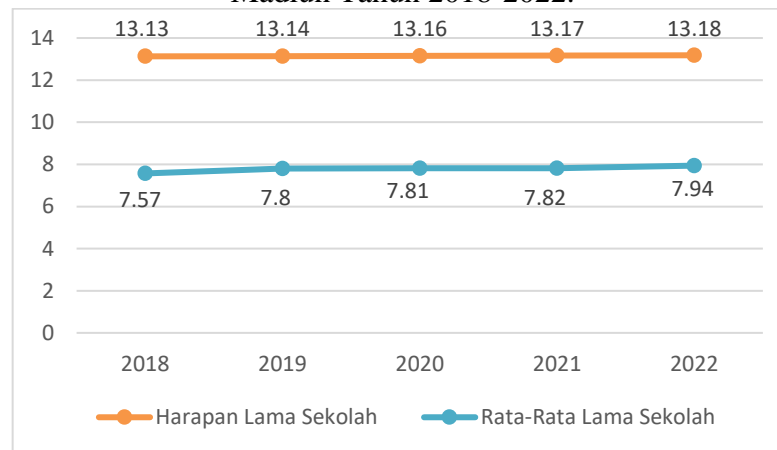
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun

Dapat dilihat pada **Grafik 2** menggambarkan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Madiun selama periode (2018-2022), usia harapan hidup (UHH) Kabupaten Madiun, yang merupakan salah satu komponen IPM, meningkat dari 70,97 tahun menjadi 71,90 tahun. Peningkatan ini terus berlanjut dari tahun 2018 hingga 2022. Pada tahun 2021, angka ini meningkat menjadi 71,50 tahun. Hal ini menunjukkan bagaimana bidang pelayanan kesehatan mampu menghadapi tantangan pandemi.

Angka harapan hidup ini meningkat menjadi 71,90 tahun pada tahun 2022 meskipun pandemi masih berlangsung saat itu. Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan di Kabupaten Madiun semakin baik serta ketersediaan fasilitas untuk masyarakat semakin meningkat. AKB atau Angka Kematian Bayi pada tahun 2010 sebesar 32,07 per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi pada tahun 2020 sebesar 14,31 per 1000 kelahiran hidup mengalami penurunan yang pesat dibandingkan tahun 2010. Kebijakan program pemerintah seperti Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), Pelayanan KB, Pemeriksaan HIV dan Hepatitis B sangat berperan penting untuk mengurangi angka kematian bayi.

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan perkiraan rata-rata jumlah waktu tambahan yang diharapkan akan dijalani seseorang. Jumlah rata-rata tahun yang akan dijalani seseorang setelah ulang tahun ke-x adalah cara lain untuk mendefinisikan AHH. Angka harapan hidup saat lahir adalah metrik yang sering digunakan untuk mewakili status kesehatan pada saat itu.

Grafik 3. Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun

Berdasarkan **Grafik 3** Seperti yang terlihat, dari data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun dari tahun 2018 hingga 2022. Di Kabupaten Madiun, Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah 13,13 tahun, sedangkan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) sekitar 7,57 tahun pada tahun 2018. HLS menjadi 13,14 tahun dan RLS menjadi 7,80 tahun pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa RLS telah meningkat secara signifikan sementara HLS sedikit meningkat. Keduanya memiliki kecenderungan untuk naik secara bertahap di antaranya. Kedua indikator tersebut kemudian berubah menjadi 13,16 dan 7,81 tahun, masing-masing pada tahun 2020, dengan sedikit peningkatan pada awal pandemi COVID-19.

Pada tahun 2021, terjadi kenaikan terhadap HLS sebesar 13,17 tahun dan 7,82 tahun untuk RLS. Hal ini menunjukkan bagaimana sistem pendidikan dapat menyesuaikan diri dengan kesulitan yang ditimbulkan oleh pandemi. Perkiraan lamanya pandemi hingga tahun 2022 tidak mempengaruhi HLS dan RLS. Terjadi peningkatan yang signifikan menjadi 13,18 tahun dan 7,94 tahun. Angka-angka tersebut membuktikan kegigihan sektor pendidikan dan upayanya untuk menjaga agar pendidikan berkualitas tinggi tetap dapat diakses meskipun dalam keadaan yang sulit.

Menurut Badan Pusat Statistik (2020), Harapan Lama Sekolah merupakan metode yang dikembangkan dari metode lama, yaitu Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf. Harapan Lama Sekolah (HLS) digunakan dan diteliti secara menyeluruh sebagai salah satu indikator IPM mulai tahun 2010.

Harapan lama sekolah adalah perkiraan jumlah tahun pendidikan yang harus ditempuh oleh seorang anak pada usia tertentu di masa depan. Prediksi jumlah tahun sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator harapan lama sekolah digunakan di berbagai tingkatan untuk menilai seberapa jauh sistem pendidikan yang ada. Indikator ini dinyatakan sebagai jumlah tahun (dalam tahun pendidikan) yang seharusnya diterima oleh setiap anak hingga usia dua belas tahun dan seterusnya.

Menurut Sirilius Seran (2017), mereka yang berpendidikan (formal) hingga tamat universitas memiliki kemampuan intelektual yang relatif lebih tinggi dibandingkan mereka yang hanya tamat SMA, menurut jurnal penelitiannya. Berkat pendidikan yang lebih tinggi, orang-orang yang memiliki kualitas yang lebih tinggi memiliki pilihan yang lebih banyak dalam hal jenis dan bidang pekerjaan. Dalam hal memilih pekerjaan, mereka relatif lebih pemilih atau selektif. Gaji dan kenyamanan tempat kerja mungkin berdampak pada hal ini. Beberapa diantaranya bahkan mengatakan bahwa mereka lebih baik tidak bekerja dan menganggur (untuk sementara waktu).

Dalam kerangka pembangunan manusia, pembangunan ditujukan untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam semua proses pembangunan. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan supaya meningkatkan kualitas penduduk dalam beberapa aspek, yaitu:

1. Aspek Fisik (kesehatan)
2. Aspek Intelektualitas (pendidikan)
3. Aspek Kesejahteraan Ekonomi (berdaya beli)
4. Aspek Moralitas (iman dan takwa).

Komponen IPM terdiri dari Angka Harapan Hidup Saat Lahir – AHH (*Life Expectancy - e₀*), Rata-rata Lama Sekolah – RLS (*Mean Years of Schooling-MYS*). Angka Harapan Lama Sekolah – HLS (*Expected Years of Schooling-EYS*). Pengeluaran per kapita disesuaikan dengan pengeluaran per kapita yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity – PPP*). Angka Harapan Hidup saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Penghitungan AHH didapatkan dari hasil sensus dan survei kependudukan. AHH dihitung menggunakan metode tidak langsung dan menggunakan metode *Brass varian Trussel*, dengan *life* tabel *Coale-Demeney West Model*.

Produktivitas, pemerataan, keseimbangan, dan pemberdayaan adalah empat komponen utama yang menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia. Ada beberapa aspek dalam gagasan pembangunan manusia yang harus diseimbangkan seperti meningkatkan kemampuan fisik penduduk termasuk kesehatan, pendidikan, dan tingkat keterampilan. Lalu, dengan memanfaatkan kemampuan untuk mengambil bagian dalam kegiatan politik, sosial, budaya, dan kegiatan produktif.

Pada dasarnya, Indeks Pembangunan Manusia adalah proses melakukan perbaikan dan investasi pada kondisi manusia. Melalui berbagai inisiatif

pembangunan, upaya-upaya dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan standar hidup penduduk memastikan bahwa pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi berjalan berdampingan. Kualitas hidup manusia dalam hal kesehatan, pendidikan, dan ekonomi akan meningkat secara signifikan pada saat generasi berikutnya lahir. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan hanya alat dari pembangunan. Menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Jika tidak terpenuhi, maka akan timbul masalah sosial dan konflik politik yang dapat menghambat ekspansi ekonomi.

KESIMPULAN

Adanya program yang langsung diarahkan pada penduduk miskin seperti penyediaan kebutuhan pokok, pengembangan sistem jaminan sosial, dan pengembangan budaya usaha merupakan upaya kebijakan pemerintah daerah dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Peningkatan IPM mengindikasikan bahwa upaya-upaya yang cukup besar telah dilakukan untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, meskipun terjadi fluktuasi dalam jumlah penduduk miskin. Kebijakan desentralisasi pemerintah melalui Program Perlindungan Sosial seperti memberikan beras untuk orang miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kemensos, dan Program Satu Juta Rumah. PUPR diharapkan mampu berkontribusi pada peningkatan kapasitas penduduk untuk mengatasi masalah kemiskinan. Hal ini merupakan salah satu metode yang paling efisien untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Oleh karena itu, program kebijakan pemerintah harus terus dievaluasi untuk memastikan bahwa hal tersebut memberikan hasil yang diharapkan. Secara keseluruhan, kajian ini memberikan landasan bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Madiun. Mempertahankan tren positif dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Madiun akan membutuhkan evaluasi terhadap program yang telah diberikan dan integrasi pendekatan yang berkelanjutan. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia berperan penting dalam usaha mengurangi tingkat kemiskinan. Kualitas hidup manusia yang baik akan menjadi faktor pendukung berkurangnya jumlah penduduk miskin. Semakin tinggi tingkat Indeks Pembangunan Manusia maka akan menunjukkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat semakin baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Smith, B.C. (1985). *Desentralisasi, Dimensi Teritorial Negara*, London: George Allen & Unwin.
- Pandita, G. (2021). Pentingnya Mengetahui Produk Domestik Regional Bruto. *Jojonomic.Com*. <https://www.jojonomic.com/blog/produk-domestik-regional-bruto/> (2021).
- Anwar Sanusi. (2012). *Metodologi Penelitian Bisnis, Cetakan Kedua*. Bandung: Salemba Empat

- Pradipta, S. & Dewi, R. (2020). Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan. *JUPE*, Volume 08 Nomor 03, pp. 109-115.
- Susilowati, D. & Suliswanto, M. (2015). Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Utang Luar Negeri dan Kemiskinan (Kajian Teoritis di Indonesia). *Jurnal Inovasi Bisnis dan Ekonomi*, Volume 06 No.1, hal. 89
- Krugman, P. (2018). Teori Umum Ketenagakerjaan, Bunga, dan Uang. Dalam: Teori Umum. s.l: s.n., hal. 27.
- Madiun Satu Data. (2002). Indikator Pembangunan Kabupaten Madiun Tahun 2022.
- BPS Kabupaten Madiun. (e.d.). Sótt 26. nóvember 2023, af <https://madiunkab.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab1Jalal>, F dan D Supriadi. Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah. Yogyakarta: Adicita, 2001
- Mas'udi. (2010) "Jurnal Desentralisasi" Volume Nomor 5.lan.go.id/id/jurnal/jurnaldesentralisasi/jurnal-desentralisasi-volume-8-no-5-tahun-2010 diakses pada 15 April 2022.
- Permana, A (2012). Sistem Informasi Kesehatan, Dalam: Teori Umum. s.l: s.n., hal. 25.
- Agrinda. (2016). Analisis Ketimpangan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan di Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(2), 178–188
- Kansil, C.S.T. (2003). Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Jakarta: Aksara Baru, 2003
- Yacoub, Y. (2012). Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur
- Rustam. (2010). Perencanaan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Dalam Rangka Mengurangi Angka Pengangguran Dan Kemiskinan.
- Aziz, G. A., Rochaida, E. Warsilan, W. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di kabupaten kutai kartanegara. *Inovasi: Jurnal Ekonomi Keuangan, dan Manajemen*. Vol. 12, No. 1, hal 29-48.
- Sirilius Seran. (2017) Hubungan Antara Pendidikan, Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemiskinan “, *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 2017.
- Iron Dunia, (2021), Praktik Keberhasilan dan Permasalahan Desentralisasi di Indonesiapp. 1 Kompasiana.com, <https://www.kompasiana.com/ironiduni332/6176d6c506310e464f6d9c3/praktik-keberhasilan-dan-permasalahan-desentralisasi-di-indonesia>, diakses pada 19 Mei 2022
- Juliannisa, I. A., & Siswantini, T. (2020). Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pemberantasan buta huruf. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 29–42.
- Irawan. (2015). “Wisata Madiun Segera Memiliki Proyek Besar”. Diakses pada 30 November 2023 pukul 21.00 Wib, dari <https://www.solopos.com/tag/pariwisata-madiun>
- Sutarto, Ayu. (2008). Pemetaan Kebudayaan di Provinsi Jawa Timur: Sebuah Upaya Pencarian Nilai-Nilai Positif. 1st ed. Jakarta: Biro Mental Spiritual Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun 2022, Data dan Informasi Penduduk Miskin Kabupaten Madiun 2018-2022

Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun 2022, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Madiun 2018-2022

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 2022, Data dan Informasi Penduduk Miskin Provinsi Jawa Timur 2018-2022

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 2022, Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur 2018-2022